
IMPLEMENTASI TEORI GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ADMINISTRASI PUBLIK

Dana Mulanda¹, M. Fachri Adnan²

Universitas Negeri Padang
Email: danamulanda25@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the implementation of Good Governance theory in improving public administration performance. Good Governance is considered an essential framework for achieving effective, transparent and accountable governance in public administration. This research uses descriptive analysis methods and literature studies to evaluate the concept of Good Governance and apply it in the context of public administration. The research results show that the implementation of Good Governance in public administration involves several key aspects, including community participation, accountability, transparency, rule of law, and efficiency. Efforts to improve public administration performance must be based on the principles of Good Governance. Active community involvement in the decision-making process, monitoring policy implementation, and government accountability are the keys to achieving Good Governance. Apart from that, there is a need to strengthen the capacity and integrity of public administration institutions as part of the implementation of Good Governance. Effective management systems, human resource development, and the application of information technology can support the achievement of Good Governance goals in improving public administration performance. This research provides an important contribution to the understanding of the importance of integrating Good Governance theory in the context of public administration. The practical implication is that the implementation of Good Governance can be the basis for improving the public administration system which is more responsive, accountable and oriented towards community services. Thus, this research can be a guide for policy makers and public administration practitioners in optimizing the performance of the public administration system through the application of Good Governance principles.

Keywords: Good Governance, Performance, Public Administration

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi teori Good Governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik. Good Governance dianggap sebagai kerangka kerja yang esensial untuk mencapai tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan studi literatur untuk mengevaluasi konsep Good Governance dan menerapkannya dalam konteks administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Good Governance dalam administrasi publik melibatkan beberapa aspek kunci, termasuk partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan efisiensi. Upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi publik harus didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance ini. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan pelaksanaan kebijakan, dan pertanggungjawaban pemerintah menjadi kunci untuk mencapai Good Governance. Selain itu, perlunya memperkuat kapasitas dan integritas lembaga-lembaga administrasi publik sebagai bagian dari implementasi Good Governance. Sistem manajemen yang efektif, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi dapat

mendukung pencapaian tujuan Good Governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman tentang pentingnya mengintegrasikan teori Good Governance dalam konteks administrasi publik. Implikasi praktisnya adalah bahwa penerapan Good Governance dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem administrasi publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan praktisi administrasi publik dalam mengoptimalkan kinerja sistem administrasi publik melalui penerapan prinsip-prinsip Good Governance.

Kata kunci: Good Governance, Kinerja, Administrasi Publik

DOI : -

Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Masyarakat bangsa kita kini mengharapkan pemerintah mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Implementasi yang efektif mengacu pada eksekusi yang tepat sasaran sejalan dengan strategi strategis yang telah ditentukan, Efektif berarti pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang bermanfaat dan transparan; akuntabel artinya penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara atas kebijakan yang telah ditetapkan dan atas kinerjanya pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Segala kebijakan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara terbuka untuk pengawasan publik dan setiap orang yang mengerjakannya dapat diawasi secara langsung untuk memberikan penilaian terhadap kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Maryam (2018)

Manajemen pembangunan, yang sering disebut administrasi pembangunan, mencakup tata kelola yang baik sebagai salah satu aspeknya. Intinya, implementasi sistem karena pelayanan publik yang lebih baik disediakan oleh pemerintahan yang dikelola dengan baik, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, harus memprioritaskan penerapan tata kelola yang baik. Pemerintah pusat berperan dalam manajemen pembangunan atau administrasi pembangunan. Hasilnya, pemerintah berkembang menjadi agen perubahan masyarakat dalam suatu negara yang juga terus berkembang, khususnya di pusat-pusat regional. (Mustanir at al., 2019).

Agar dapat tercapai, pelayanan publik harus mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadikannya sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan. Melayani masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik. (Jamal. 2020). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk meningkatkan efisiensi aparatur negara. Hal ini bertujuan agar perbaikan birokrasi dapat ditingkatkan dan pelayanan publik dapat dihasilkan dengan lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan gagasan prinsip-prinsip good governance. (Cahyadi, 2017).

Meskipun globalisasi didefinisikan sebagai saling ketergantungan antar negara, khususnya dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan aktivitas korporasi, demokrasi di Indonesia ditandai dengan meningkatnya pengaruh sosial terhadap administrasi pemerintahan. Evolusi globalisasi dan demokratisasi memerlukan pendefinisian ulang peran

mereka yang terlibat dalam administrasi pemerintahan. Pemerintahan yang selama ini mempertahankan kontrol ketat terhadap pemerintah, pada akhirnya harus melakukan transisi dari pemerintahan yang mengatur dan mendikte ke pemerintahan yang memfasilitasi.

Etika dan protokol pelayanan yang muncul dalam birokrasi kita sangat berbeda dengan prinsip dan adat istiadat yang menghormati masyarakat sebagai individu yang berdaulat. Lebih lanjut, konsep PNS sebagai pegawai negeri (pegawai negeri dalam arti sebenarnya) mendapat tantangan untuk menjadi kenyataan karena sejak era reformasi, jabatan pegawai negeri (*ambtennar*) sudah mulai dilihat oleh masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, sebagai seorang yang terhormat. Hal ini terlihat dari pemerintahan yang ada saat itu yang bernama *Pangreh Raja* (Pemerintah Negara) dan *Pamong Praja* (Penjabat Pemerintah), yang menunjukkan bahwa mereka lebih siap untuk dilayani, bukannya siap untuk melayani.

Lebih lanjut, pola pelayanan ideal yang dipuja belum dapat mendukung keterbatasan infrastruktur organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pedoman atau praktik yang seragam dalam pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta minimnya persyaratan kualitas yang perlu diwaspadai oleh masyarakat umum sebagai pelanggan, serta adanya informasi yang komprehensif mengenai tanggung jawab organisasi pelayanan publik.

Terdapat kasus UNDP dan Bank Dunia terus mendukung tata pemerintahan yang baik, meskipun mereka belum memiliki kesepakatan yang tegas. Gagasan ini paling umum dipahami sebagai cara untuk mencapai operasi pemerintah yang efektif dan efisien. Bank Dunia adalah donor yang membantu negara-negara membangun kapasitas kelembagaan mereka dan menawarkan pelatihan pegawai negeri untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pendekatan penelitian ini memadukan tinjauan pustaka dengan metode pengumpulan data deskriptif kualitatif. Kurangnya kontrol terhadap penerapan tata pemerintahan yang baik di kalangan aktor pemerintah merupakan salah satu keberatan yang dilontarkan terhadap gagasan tata pemerintahan yang baik.

Selain itu, meskipun cita-cita tata pemerintahan yang baik tidak sesuai dengan sistem tata kelola negara bagian, federal, dan lokal saat ini, hal tersebut sering kali diterapkan pada suatu negara. Terkait penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain reformasi birokrasi yang belum memadai, praktik KKN, dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip yang, dalam beberapa hal, tidak sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia. masyarakat, namun keterlibatannya masih sedikit.

Latar belakang masalah implementasi teori Good Governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik mencakup sejumlah faktor kunci yang menggarisbawahi pentingnya penelitian ini. Beberapa pertimbangan latar belakang masalah melibatkan:

1. Tuntutan Masyarakat yang Semakin Kompleks

Perkembangan masyarakat modern membawa perubahan signifikan dalam kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kompleksitas tuntutan masyarakat dapat menciptakan tekanan tambahan pada administrasi publik untuk menjadi lebih efisien, responsif, dan akuntabel.

2. Tingginya Harapan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Good Governance menekankan prinsip-prinsip ini, dan implementasinya diharapkan dapat menjawab harapan masyarakat akan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

3. Tantangan Global dan Lokal

Administrasi publik dihadapkan pada tantangan kompleks, termasuk perubahan ekonomi global, krisis kesehatan, dan masalah lingkungan. Implementasi Good Governance dapat menjadi alat untuk mengatasi tantangan ini dan membangun keberlanjutan di tingkat lokal dan global.

4. Peningkatan Kompleksitas Kebijakan Publik

Dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan urbanisasi, kebijakan publik menjadi semakin kompleks. Dalam konteks ini, pentingnya Good Governance sebagai landasan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan menjadi semakin krusial.

5. Pengalaman Negatif dalam Administrasi Publik

Kejadian korupsi, ketidaktransparan, dan ketidakmampuan administrasi publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat menciptakan kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem administrasi publik. Good Governance menjadi solusi yang potensial untuk mengatasi masalah ini.

6. Persaingan Global dan Investasi

Negara-negara bersaing untuk menarik investasi dan memperbaiki citra internasional mereka. Implementasi Good Governance dapat meningkatkan kepercayaan

investor dan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

7. Krisis Kepemimpinan dan Kepercayaan Masyarakat

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik dapat menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Good Governance, dengan menempatkan integritas dan transparansi sebagai prinsip utama, dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat.

Melalui pemahaman mendalam terhadap latar belakang ini, penelitian tentang implementasi teori Good Governance diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kinerja administrasi publik dan pengelolaan sumber daya publik yang lebih efektif.

2. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah sekelompok kajian tentang pengumpulan data, pembacaan, pencatatan, dan tata cara pengolahan sumber-sumber penelitian kepustakaan. Selama proses pengumpulan data, penulis berkonsultasi dengan jurnal penelitian domestik dan internasional, laporan tahunan, buku tambahan, jurnal online dan situs web, serta sumber-sumber lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan.

Tinjauan literatur mengisi kesenjangan penelitian dari penelitian sebelumnya dan membangun hubungan antara penelitian baru dan kumpulan literatur saat ini dengan memberi informasi kepada pembaca tentang temuan penelitian yang ada dan sangat relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan pada saat itu. (Wirapraja & Hariyanti, 2018).

Teknik analisis data yang diterapkan dalam studi literatur ini adalah analisis isi. Dengan mengkaji komunikasi yang terdapat dalam buku teks, jurnal, surat kabar, novel, musik, iklan, dan jenis komunikasi lainnya, akademisi dapat memperoleh pemahaman tidak langsung tentang perilaku manusia. Analisis adalah proses mengidentifikasi kata, ide, subjek, frasa, karakter, atau kalimat tertentu dalam suatu teks atau kumpulan teks. (Sari, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan

Mendefinisikan batasan ide implementasi kebijakan merupakan suatu tantangan karena dilihat dari berbagai sudut pandang. Pengertian implementasi secara sederhana dapat ditemukan dalam kamus Webster Wahab tahun 2005. Disebutkan bahwa “toimplement” adalah “menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu; pada apa pun). (Darmiah dan Mustanir, 2018)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik dari teori George C. Edward yaitu:

1. Komunikasi, organisasi merupakan proses yang sangat rumit dan sulit. Hanya dapat dipegang oleh satu orang untuk keperluan tertentu atau untuk didistribusikan. Selain itu, sumber informasi yang beragam akan menghasilkan penafsiran yang beragam pula. Siapa yang bertanggung jawab atas implementasi untuk memastikan efektivitas? Orang yang bertugas melaksanakan suatu pilihan harus menyadari kemampuannya. Kurangnya komunikasi dari para pelaksana mempunyai dampak besar terhadap bagaimana kebijakan diimplementasikan.
2. Sumber Daya. Implementasi tidak akan berhasil meskipun instruksi diberikan secara tepat, ringkas, dan konsisten jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya. Ketersediaan sumber daya sangat penting untuk melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya mencakup personel dengan jumlah dan kualifikasi yang sesuai untuk melakukan pekerjaan mereka, serta pengetahuan, tenaga, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengubah rencana tertulis menjadi layanan publik yang operasional.
3. Menurut Edward III, disposisi adalah kecenderungan, keinginan, atau persetujuan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kesiediaan pihak-pihak yang bertugas melaksanakan kebijakan untuk melakukan hal tersebut sama pentingnya dengan efektivitas implementasi kebijakan seperti halnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pelaku parapolicy.
4. Struktur Birokrasi. Implementasi kebijakan mungkin sulit dilakukan meskipun sumber daya tersedia cukup, pelaksana kebijakan mempunyai motivasi dan pengetahuan tentang apa yang perlu dilakukan, dan kebijakan itu sendiri telah dirancang dengan baik. Belum efektif karena inefisiensi struktur birokrasi. Aspek

struktur birokrasi meliputi struktur organisasi internal organisasi yang bersangkutan serta hubungan eksternal organisasi.

3.2. Konsep Good Governance

Definisi bahasa Inggris dari "pemerintah" adalah "badan pemerintahan suatu bangsa, negara bagian, kota, dll." Namun, kata "pemerintahan" atau "governance" dalam bahasa Inggris merujuk pada "*the act, fact, way of governing*", yaitu "tindakan, fakta, pola, dan sikap atau penyelenggaraan kegiatan administrasi". Menurut Kooiman (Sedarmayanti 2012:2), maka tata kelola adalah suatu kegiatan atau proses. Lebih tepat digambarkan sebagai rangkaian interaksi sosial dan politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai domain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan campur tangan pemerintah terhadap kepentingan tersebut (Nurimansyah dkk. 2020).

Sebagaimana dinyatakan oleh United Nations Development Program (UNDP) (Kasemin 2015:33), good governance adalah "implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan." Dengan kata lain, hal ini berarti bahwa tata pemerintahan yang baik memadukan hubungan yang positif dan kooperatif antara sektor publik dan swasta dengan penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan. (Dkk., Nurimansyah, 2020)

Mardiasmo (1999: 18) mendefinisikan good governance sebagai suatu strategi dimana pemerintah memusatkan perhatian pada pertumbuhan sektor publik. Negara-negara dengan pemerintahan birokratis harus mengubah tren mereka. Birokrasi populis menggantikan birokrasi yang mementingkan diri sendiri dan elitis. Di manakah upaya pengelolaan sumber daya yang berasal dari birokrasi pemerintah dan swasta sebagai pengelola sumber daya yang mengelola sumber daya di luar negeri? Pemanfaatan pada akhirnya, keterlibatan organisasi rakyatnya sebagai check and balance terhadap negara sangat diperlukan demi tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. (Cahyadi, 2017)

3.3. Prinsip-prinsip Good Governance

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNDP, mengatakan bahwa ciri-ciri atau gagasan berikut akan tercipta dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Nurimansyah,at.al. 2020)

- a. Keterlibatan Dalam proses pengambilan keputusan, setiap individu atau warga negara harus mempunyai hak suara yang sama berdasarkan tujuan dan kepentingannya masing-masing.
- b. Hukum dan Ketertiban (Rule of Law) Kerangka peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, harus adil, ditegakkan, dan dipatuhi sepenuhnya.
- c. Keterbukaan dan kejujuran agar informasi dapat digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi, informasi tersebut harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan dengan cara yang dapat dimengerti, dapat diakses secara bebas oleh mereka yang memerlukannya, dan dibangun dalam kerangka aliran bebas proses informasi yang beragam.
- d. Daya Tanggap (Respons): Semua lembaga dan prosedurnya harus fokus dalam upaya membantu berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).
- e. Pendekatan Konsensus Untuk mengambil keputusan demi kepentingan terbaik masing-masing pihak, tata kelola pemerintahan yang baik akan berfungsi sebagai mediator bagi berbagai kepentingan.
- f. Pemerintahan yang berfungsi dengan baik akan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mencapai tujuan.
- g. Efektivitas dan Efisiensi Setiap prosedur dan organisasi dirancang untuk menggunakan sumber daya semaksimal mungkin dari berbagai sumber yang dapat diakses untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar memenuhi kebutuhan Anda.
- h. Pengambil keputusan di sektor publik mempunyai akuntabilitas baik kepada pemilik (stakeholder) maupun masyarakat umum. Warga negara bertanggung jawab terhadap keduanya. Kewajiban ini berbeda-beda berdasarkan jenisnya Keputusan yang dibuat oleh suatu organisasi mungkin bersifat internal atau eksternal.
- i. Pernyataan Visi Strategis. Para pemimpin dan warga negara memandang tata kelola yang efektif dari sudut pandang jangka panjang yang luas dan mempertimbangkan kebutuhan akan pertumbuhan manusia dan pembangunan itu sendiri. Selain itu, mereka menyadari kompleksitas sosial yang mendasari pendapat mereka serta dimensi sejarah, budaya, dan lainnya.
- j. Bahwa masing-masing ciri pemerintahan yang efektif di atas saling berhubungan, memperkuat yang lain, dan tidak dapat berdiri sendiri.

3.4. Kajian Teoriti Meningkatkan Kinerja Adminidtrasi Publik (Pelayanan Masyarakat)

Pada kenyataannya, studi administrasi publik telah lama menjadi pusat kontroversi seputar optimalisasi pelayanan publik oleh pemerintah. Perdebatan para ahli mengenai bagaimana membentuk pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan efisien telah berlangsung selama beberapa dekade. Setiap ahli menyajikan teori dan/atau menantang dan memajukan teori sebelumnya. Ketika teori-teori yang sudah mapan “dimitoskan” dan menjadi paradigma,

Konsep Reinventing Government yang diusung Osborne dan Gaebler mencakup sepuluh konsep kewirausahaan untuk birokrasi. *Prinsip pertama* adalah tata kelola katalitik, yang menekankan pada pengendalian atas mengayuh. Jika pemerintah diibaratkan sebuah perahu, maka fungsinya adalah sebagai pengemudi, yang memandu jalannya kapal, dan bukan sebagai pendayung, yang menarik dayung untuk mendorong perahu maju. Pemerintah dengan pola pikir kewirausahaan harus lebih fokus pada mengarahkan membuat kebijakan strategis daripada mengayuh menangani isu-isu layanan teknis. Hal ini memungkinkan pemerintah berfungsi sebagai pembeli yang mahir, memanfaatkan produsen untuk mencapai tujuan kebijakannya.

Dalam banyak hal, pejabat publik terus memberikan layanan, meskipun mereka sering kali harus bersaing dengan penyedia layanan swasta untuk mendapatkan keuntungan. Namun penyedia layanan publik tersebut tidak berafiliasi dengan kelompok pengelola yang membuat kebijakan. Mereka yang memiliki kemampuan untuk memahami gambaran besarnya dan mengelola tuntutan sumber daya yang saling bertentangan diperlukan untuk memimpin aktivitas. Dibutuhkan orang yang berkomitmen penuh untuk menyelesaikan suatu tugas dengan keunggulan dalam mengayuh sepeda.

Kedua, rakyat memberikan kewenangan kepada pemerintah, bukan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan yang mengedepankan pelayanan mengakibatkan ketergantungan pada masyarakat. Kebebasan sosio-ekonomi mereka bertentangan dengan hal ini. Oleh karena itu, mendorong inisiatif mereka sendiri harus menggantikan metode pelayanan. Klub sosial, organisasi persaudaraan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi sumber pemecahan masalah bagi diri mereka sendiri. Bentuk pemberdayaan ini pada akhirnya akan menumbuhkan lingkungan di mana warga negara berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemerintah adalah milik mereka. Tugas pemerintah tidak berakhir ketika pemerintah berusaha memaksakan kepemilikan dan kendali atas masyarakat. Bahkan ketika pemerintah tidak dapat lagi menyediakan layanan, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa persyaratannya dipenuhi.

Ketiga, tata kelola yang kompetitif: menghadirkan persaingan dalam penyediaan layanan. Artinya, upaya untuk menyediakan setiap layanan akan menyebabkan habisnya sumber daya pemerintah dan juga pertumbuhan layanan yang diperlukan melebihi kapasitas pemerintah (organisasi publik). Akibatnya,

layanan publik yang diberikan oleh organisasi-organisasi ini memiliki kualitas dan efektivitas yang rendah. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah harus menumbuhkan persaingan antar sektor publik, swasta, dan non-pemerintah. Peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi, dan pengembangan suasana yang lebih kreatif merupakan hasil yang diharapkan.

Salah satu keuntungan paling nyata dari persaingan adalah peningkatan produktivitas, yang meningkatkan pendapatan; persaingan memaksa terjadinya monopoli, baik pemerintah maupun swasta; persaingan memberi insentif pada inovasi; dan persaingan menanamkan rasa harga diri dan keuletan pada pegawai negeri.

Keempat, mentransformasi perusahaan yang berbasis aturan melalui tata kelola yang berbasis misi. Hal ini berarti bahwa karena pemerintahan yang berbasis peraturan beroperasi dengan lambat dan melelahkan, maka pemerintahan tersebut akan menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, agar pemerintah dapat berfungsi lebih efektif dan efisien, misi harus menjadi tujuan utamanya. Birokrat pemerintah dapat membuat kerangka peraturan dan anggaran mereka sendiri yang memberikan otonomi kepada staf mereka untuk melaksanakan tujuan organisasi dengan menjadikannya sebagai tujuan mereka. Pemerintahan yang termotivasi oleh suatu tujuan lebih baik daripada pemerintahan yang didorong oleh peraturan karena pemerintahan tersebut lebih inventif, efisien, mudah beradaptasi, dan antusias.

Kelima, membiayai hasil dibandingkan masukan dalam pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Hal ini berarti berkurangnya insentif bagi lembaga pemerintah untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi jika pendanaan mereka ditentukan oleh input (pendapatan). Namun, jika pendanaan mereka bergantung pada kinerja mereka, mereka mengembangkan obsesi terhadap kesuksesan. Struktur gaji dan insentif, misalnya, harus ditentukan oleh kualitas pekerjaan yang dihasilkan, bukan oleh jumlah kekuasaan, masa kerja, atau anggaran. Rezim birokrasi jarang berhasil karena mereka tidak memantau hasilnya. Meskipun mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan umum, tidak ada perbedaan dalam angka putus sekolah dan hasil tes. Meskipun mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk penjara dan polisi, tingkat kejahatan masih meningkat.

Jadi, penerapan tata kelola yang baik diperkirakan dapat membantu menumbuhkan lingkungan perusahaan yang positif, meningkatkan daya saing, dan sangat berhasil dalam menghindari anomali serta menggagalkan korupsi dan penyuapan. Dunia usaha dan otoritas negara baik di pusat maupun di daerah sering kali menyatakan keinginannya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Persoalannya adalah bagaimana mencapai tata kelola yang baik dan kebijakan apa yang harus diambil untuk mewujudkannya.

5. SIMPULAN

Kesimpulan dari implementasi teori Good Governance dalam meningkatkan kinerja administrasi publik menyoroti sejumlah hal penting yang dapat diambil sebagai gambaran akhir dari penelitian atau analisis yang dilakukan. Berikut beberapa kesimpulan yang mungkin dihasilkan yaitu:

1. Pentingnya Good Governance. Implementasi teori Good Governance muncul sebagai langkah krusial dalam memperbaiki kinerja administrasi publik. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan aturan hukum terbukti memberikan dasar yang kokoh untuk tata kelola yang baik.
2. Peningkatan Responsivitas dan Efisiensi. Good Governance memberikan landasan untuk meningkatkan responsivitas administrasi publik terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan meminimalkan birokrasi yang tidak perlu dan mempromosikan efisiensi, kinerja administrasi dapat meningkat secara signifikan.
3. Keterlibatan Masyarakat sebagai Kunci Sukses. Partisipasi aktif masyarakat adalah elemen penting dalam implementasi Good Governance. Penerapan kebijakan yang lebih baik dan hasil yang lebih baik dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan.
4. Peran Sistem Manajemen dan Teknologi Informasi. Penguatan kapasitas lembaga administrasi publik, pengembangan sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi menjadi kunci dalam mewujudkan Good Governance. Sistem manajemen yang efektif dan teknologi informasi dapat mendukung perbaikan kinerja administrasi publik.
5. Tantangan Implementasi. Meskipun penting, implementasi Good Governance tidak terjadi tanpa tantangan. Perubahan budaya organisasi, resistensi terhadap perubahan, dan masalah kelembagaan dapat menjadi rintangan yang perlu diatasi untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam administrasi publik.
6. Dampak Positif pada Kepercayaan Masyarakat. Implementasi Good Governance dapat membantu membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterbukaan dan akuntabilitas meningkatkan legitimasi lembaga publik di mata masyarakat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Arif. 2017. "Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)." JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik 3(2).
- Donald. 1984. "Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator Dan Implementasinya." Book: 22. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf>.
- Jamal, Yenni, Ahmad Mustanir, and Adam Latif. 2020. "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa CiroCiroe Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang." PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 8(3): 207–12.
- Maryam, Neneng Siti. 2018. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi VI(1): 1–18.
- Mustanir, Ahmad, and Darmiah Darmiah. 2018. "Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe

- Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Politik Profetik* 4(2): 225–38. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>.
- Mustanir, Ahmad, and Irfan Jaya. 2018. “Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Politik Profetik* 4(1): 84– 97. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2741#%0Ahttp://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/430>.
- Mustanir, Ahmad, and Jusman. 2018. “Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jurnal Ilmiah Akmen* 13(3): 542–58. <https://e-jurnal.stienobelindonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/69%0Ahttps://e-jurnal.stienobelindonesia.ac.id/index.php/akmen/issue/view/6>.
- Mustanir, Ahmad, Adam Latif, and Irwan Irwan. 2019. “Analisis Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan Di Enrekang.” *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)* 5(2): 1– 20. journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp.
- Nurimansyah, Muwaffiq, R Misriah Ariyani, Sulawesi Selatan, and Jawa Barat. 2020. “Implementasi Good Governance Dalam.” 2(2): 114–27.
- Sulaeman, Zhilviana, Ahmad Mustanir, and Andi Ilham Muchtar. 2019. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 7(3): 88–92.